



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 249 /KUM/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR
100.3.3.2/157/KUM/2026 TENTANG PENETAPAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penambahan jumlah usulan Rancangan Peraturan Bupati Tabalong dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/157/KUM/2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan perkada ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Lembaga Komisi atau Instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan perencanaan penyusunan perkada yang telah ditetapkan dapat dilakukan penambahan atau pengurangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/157/KUM/2026 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2026, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/206/KUM/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/157/KUM/2026 Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 yang telah ditetapkan pada tanggal 22 April 2026, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	2
KADIS/KASUBSID/KASUBBAG/JF	2

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	1
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 7 Mei 2026.

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Seluruh Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Seluruh Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Bagian di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/249/KUM/2026
TANGGAL 7 Mei 2026

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
1.	PUPR	1. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Tanta; 2. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Muara Uya; 3. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Jaro; 4. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Bintang Ara; 5. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Haruai; 6. Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang; 7. Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang;	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042
2.	BPKAD	1. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
		2. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Pergeseran); 3. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; 4. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027; 5. Standar Harga Satuan; 6. Analisis Standar Biaya; 7. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah; 8. Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Tahun Anggaran 2026; 9. Pembayaran yang Melewati Tahun Anggaran; 10. Pembayaran Konsolidasi;	tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
3.	BAPENDA	1. Nilai Sewa Reklame; 2. Nilai Perolehan Air Tanah; 3. Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 4. Tingkat Capaian Kinerja untuk Mendapatkan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabalong; 5. Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet;	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4.	DISHUB	1. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah Tahun 2025-2045; 2. Tataran Transportasi Lokal di Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045;	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
5.	DISNAKER	1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; 2. Wajib Lapo Lowongan Pekerjaan;	Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapo Lowongan Pekerjaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
6.	SETDA	1. Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah; 2. Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Belimbing dengan Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak; 3. Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong; 4. Peta Proses Bisnis Daerah; 5. Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah; 7. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 8. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Insektorat Daerah; 9. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 10. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan;	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
		11. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 12. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 13. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 14. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 15. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja; 16. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian; 17. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup; 18. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 19. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 20. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan; 21. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik kepentingan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
		22. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; 23. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 24. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; 25. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 26. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 27. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 28. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah; 29. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 30. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 31. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
		32. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan; 33. Unit Pelaksana Teknis Daerah Berupa Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 34. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 35. Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat; 36. Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan; 37. Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah; 38. Analisis Standar Belanja Kabupaten Tabalong;	
7.	DISPERSIP	Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah;	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
8.	INSPEKTORAT DAERAH	1. Pedoman Keinvestigasian; 2. Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan;	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
		3. Pengedalian Kecurangan; 4. Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 5. Pedoman Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;	Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
			Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
9.	DISKOMINFO	1. Pedoman Pengelolaa Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; 2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong; 3. Pedoman Manajemen Risiko Keamanan Informasi; 4. Tata Kelola <i>Command Center</i> Pemerintah Kabupaten Tabalong;	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
10.	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	1. Perjalanan Dinas khususnya pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran; 2. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; 3. Insentif Petugas Satlinmas Desa;	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraa Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
11.	DINSOSP3AP2KB	Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2018 tentang Belanja Pembelian Beras Gratis untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Tabalong;	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
12.	DISDIKBUD	Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Tabalong;	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah
13.	DPMD	1. Displin Kepala Desa dan Perangkat Daerah; 2. Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
		3. Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026; 4. Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan Pihak Lainnya; 5. Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa; 6. Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengadaan Tanah Kas Desa; 7. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2027; 8. Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam Wilayah Kabupaten Tabalong;	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
14.	BAPPERIDA	1. Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Tabalong; 2. Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data; 3. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029; 4. Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

No.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL RAPERBUP	KETERANGAN
			Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
15.	BKPSDM	Sistem Pembelajaran Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABAG	
KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI